**DISMANTLING THE POWER RELATION OF OLIGARCHY IN BATU TOWN: A CASE STUDY OF ABUSE OF POWER IN GIVING TAX RELIEF AND THE POLICY CORRUPTION OF PT BWR**

Haris Samsuddin, S.Sos.,M.AP, Cakti Indra Gunawan, SE.,MM.,PhD, Dr. Cahyo Sasmito, SH.,M.Si

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

**Abstract**

Indonesia’s Democracy in Post-Soeharto era describes an oligarchical political pheneomenon by which is currently known as the oligarchic regime. The regime is marked by the strengthening of business and political relations that places those who have more material resources as dominant figures in the local political arena. Recently, this phenomenon is easily found in some regions along with the opening of decentralization in Indonesia and free electoral politics signed by money politics. One of them is now found in Batu Town, East Java. This research aims to recognize the oligarchical political structures in Batu as well as how it works in the policy making context. This study is conducted in Batu Town. It uses qualitative descriptive method. This study used the oligarchy theory of Winters and Robison-Hadiz. It finds that there is an oligarchic phenomenon in Batu which resembles the collective power oligarchy and civilian oligarchy types from Winters as well as the predatory oligarchy from Robison and Hadiz. This study also reinforces the discovery of former researchers in the same field of oligarchy issue. However, the gap of knowledge which is found by this research is the operations of oligarchy in local regime in the context of power abuse in tax paying cases undertaken by the Mayor. This research also discovers the phenomena of local oligarchic power relating to corrupt practices.

*Keywords: Oligarchy, policy, power relation*

**MEMBONGKAR RELASI KEKUASAAN OLIGARKI DI KOTA BATU: STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN KORUPSI KEBIJAKAN PT BWR**

Haris Samsuddin, S.Sos.,M.AP, Cakti Indra Gunawan, SE.,MM.,PhD, Dr. Cahyo Sasmito, SH.,M.Si

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

**Abstrak**

Demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan sebuah gejala politik oleh apa yang kini dikenal sebagai rezim oligarki. Rezim ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. Fenomena ini kini dengan mudah dijumpai di berbagai daerah seiring dengan terbukanya kran desentralisasi dan politik elektoral yang sarat politik uang. Salah satu di antara daerah di Indonesia yang tengah mementaskan praktik kekuasaan oligarki ini ialah Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami oligarki di Kota Batu berikut cara kerjanya dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat fenomena oligarki di Kota Batu yang menyerupai tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil Winters serta oligarki predatoris Robison-Hadiz. Penelitian ini juga menemukan hal baru yang belum diteliti secara mendalam oleh Winters, Robison-Hadiz maupun para peneliti oligarki terdahulu, yakni terdapat sebuah fenomena oligarki di ranah lokal (Kota Batu) yang unik, dimana oligarki ternyata juga beroperasi dalam sistem relasi kuasa dengan ciri penyalahgunaan jabatan untuk menghapus beban pajak di kalangan para oligark serta terlibat dalam praktik korupsi.

*Kata Kunci: Oligarki, kebijakan, relasi kuasa*

**Latar Belakang**

Indonesia pascareformasi memasuki babak baru rezim politik yang ditandai dengan menguatnya praktik oligarki. Fenomena oligarki kini berlangsung hampir di semua daerah otonom di Indonesia, dimana salah satunya ialah Kota Batu yang menjadi lokus penelitian ini. Sebagai sebuah kota yang baru dimekarkan dari wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu sejak masa kepemimpinan Eddy Rumpoko diwarnai dengan praktik kekuasaan oligarkis. Hal itu ditandai dengan relasi kuasa bisnis-politik yang melibatkan Eddy Rumpoko dan Paul Sastro selaku pengusaha lokal tersukses di Kota Batu dalam mendikte sejumlah kebijakan daerah di Kota Batu.

Pada masa kepemimpinan ER ini diketahui terdapat sejumlah kasus yang menyeret sang mantan wali kota ke dalam praktik yang mencedrai mandat desentralisasi. Kasusnya baru gempar setelah insiden penangkapan yang dilakukan KPK atas kasus dugaan suap dengan pengusaha (Filipus Djap) di rumah dinasnya, Jl.Panglima Sudirman No 98 kota Batu (*Kompas,* 17/9/2017). Pasca penangkapan tersebut, satu per satu persoalan di Kota Batu mulai terkuak. Seperti diketahui, jauh sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK, *Malang Corruption Watch* (MCW) (2016, 2017) pernah membeberkan banyak kasus penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) yang melibatkan Eddy Rumpoko dan beberapa pejabat daerah lainnya terkait kasus suap dan tindak korupsi. Namun, hal itu tidak pernah direspons dengan serius oleh lembaga penegak hukum.

Eddy Rumpoko (ER) memiliki jaringan bisnis-politik yang kuat dengan para pengusaha baik di lokal maupun pusat. Selain itu, ER juga dikenal mempunyai relasi khusus dengan para elite lokal lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun jaringan organisasi masyarakat sipil. Kepemilikan modalitas sosial-politik itulah yang memungkinkan ER bertahan selama dua periode kepemimpinan (2007-2012/2012-2017) serta terhindar dari jeratan hukum atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Hal inilah yang membuatnya semakin kebal hukum.

Pada tahun 2013 lalu, ER sempat dikaitkan terkait korupsi PT BWR (*Batu Wisata Resource*). Kasus ini bermula sejak dibentuknya PT BWR melalui Pertaruran Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (BWR). Diduga perusahaan ini telah melakukan penyelewangan berupa penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan direktur PT BWR, Dwi Martono Arlianto, pengusaha Abdul Latief Chaled (investor BTC-*Batu Tourism Center*) dan ER selaku kepala daerah.

Bahwa hampir seluruh perencanaan kebijakan daerah ditunggangi oleh kepentingan para pebisnis. Salah satu pebisnis terbesar di Kota Batu yang hingga kini memiliki sejumlah unit usaha pariwisata Kota Batu, Paul Sastro, diduga memiliki relasi kuat dengan ER sebagai penguasa Kota Batu. Persekutuan bisnis politik ini dapat dilacak melalui kebijakan peringanan pajak yang diterima secara eksklusif di bawah kekuasaan ER, serta berbagai kebijakan pemudahan izin pendirian unit bisnis pariwsata lainnya seperti pembangunan Jatim Park (I & II), BNS, Predator Fun Park dan terkahir JP III.

Hadirnya kerajaan bisnis Sastro di Kota Batu tentu tidak akan berjalan sukses, jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Batu. Sebab, terdapat beberapa persoalan seputar izin pendirian bangunan di balik pembangunan wisata yang dimiliki oleh Sastro. Namun, hal itu seolah berjalan mulus tiada hambatan. Salah satu kasusnya adalah penggunaan lahan warga di kelurahan Tlekung untuk bangunan wisata Predator Fun Park yang dinilai bermasalah (MCW, 2016). Pasalnya, izin pendirian bangunan dari pembangunan wisata ini sempat tidak terpenuhi sehingga memunculkan persoalan. Belakangan pembebasan lahan warga di desa Beji untuk pembangunan Jatim Park 3 (*Dino Park*) juga menuai polemik. Pasalnya, warga menuduh pihak pengembang wisata menyerobot lahan warga tanpa perundingan. Terdapat tanah kas Desa Beji seluas 4.250 meter persegi yang digunakan untuk lahan parkir Jatim Park 3 tanpa melalui perjanjian sewa terlebih dahulu dengan warga setempat. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Beji geram dan melayangkan protes terhadap pengelola JTP 3 (*detik.com,* 22 Mei 2018).

Pasca berakhirnya kekuasaan Eddy Rumpoko (ER) dan kini digantikan sang istri, Dewanti Rumpoko (DR), untuk masa bakti 2017-2022, kembali membuka pertanyaan baru, apakah ke depan Batu akan menjadi lebih baik atau sebaliknya, sepertinya tidak terlalu memberi banyak harapan. Bahkan, semula saat pencalonan DR sebagai walikota Batu banyak pihak merasa pesimistik. Beberapa pihak mengatakan tampilnya DR sebagai sosok pengganti ER adalah bagian dari kelanjutan dinasti politik. Salah satu kandidat yang menjadi rival politik DR pada Pilwako Batu 2017 lalu, HA Rudi, bahkan mengklaim dirinya sebagai penantang dinasti politik di Kota Batu, meskipun dirinya gagal memenangkan suara konstituen (*detik.com*, 20 Mei 2018).

Menyaksikan kondisi pembangunan di Kota Batu dalam kaitannya dengan pengaruh dominan kekuatan oligarki tidak lantas membuat kita percaya begitu saja bahwa Batu ke depan di bawah kepemimpinan DR akan lebih baik. Seperti yang telah terlihat kini, bahwa kuatnya cengkeraman oligarki yang melibatkan dinasti kekuasaan ER bersama berbagai relasi kekuatan pendukungnya telah membawa Kota Batu ke arah pembangunan yang lebih melayani kepentingan pemodal dan lingkar kepentingan oligark. Dalam rangka mengungkap lebih jauh terkait struktur kekuasaan oligarki di Kota Batu, penelitian dibuat dalam rangka menjawab pertanyaan tentang bagaimana memahami struktur oligarki di Kota Batu serta bagaimana cara kerjanya dalam penyusunan kebijakan.

**Memahami Struktur Oligarki di Kota Batu**

Winter membedakan istilah *oligarki* dengan *oligark.* Menurutnya, *oligark* adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya (Winters, 2011: 8). Menurutnya oligark (*oligarch*) berbeda dari semua minoritas lainnya karena dasar kekuasaan mereka–kekayaan material–sukar sekali dipecah dan diseimbangkan. Oligark karenanya didefinisikan menurut tipe dan ukuran sumber daya kekuasaan (material) yang dikendalikannya. Sementara *oligarchy* merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Winters, 2011: 10).

Selanjutnya menurut Winters, hanya oligark yang mampu menggunakan kekayaan untuk mempertahankan kekaysan (*wealth defense*). Salah satu konsep kunci dari pemahaman oligarki menurut Winters (2011: 9) adalah “strategi pertahanan kekayaan”. Terdapat dua komponen utama dari strategi pertahanan kekayaan, yakni: “pertahanan harta”(*property defense*) dan “pertahanan pendapatan” (*income defense*). Strategi yang pertama digunakan untuk mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik oligark, sementara yang kedua adalah untuk menjaga sebanyak mungkin pendapatan dan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang aman.

Winters membuat tipologi ideal mengenai oligarki. Menurutnya, semua oligarki bisa digolongkan menurut empat ciri utama, yaitu: *pertama,* kadar keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan yang menyokong hak milik atas harta dan kekayaan; *kedua,* keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan; *ketiga,* sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasan itu, apakah terpecah atau kolektif, dan; *ketiga,* oligark bersifat liar atau jinak.

Bertolak pada ciri-ciri di atas, Winters membuat empat tipe ideal dari oligarki, antara lain: pertama,*Oligarki Panglima*, yaitu oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung ada pada dirinya. Setiap Oligark memiliki senjata untuk mendapatan kekayaan. Ia memiliki tentara dan berebut secara langsung sumberdaya material dengan oligark lain. Pada dunia seperti itu, perpecahan antar oligark berada di tingkat tertinggi, sehingga persekutuan tidak stabil. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar oligark panglima. Dapat dikatakan di sini bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan cara penaklukan satu panglima ke panglima lain sehingga ancaman paling dominan terdapat pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima ini terjadi dari masa prasejarah, Eropa zaman pertengahan, dan berakhir dengan keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia (Winters, 2011).

Tipe kedua adalah *Oligarki Penguasa Kolektif*. Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Perbedaan mendasar antara *oligarki panglima* dengan *oligarki penguasa kolektif* ini terletak pada kadar kerja samanya. Dalam *oligarki penguasa kolektif* ini, para oligark bekerja sama untuk mempertahankan kekayaannya dan memerintah suatu komunitas. Dalam kebanyakan kasus, pemerintahan kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang isinya oligark semuanya. Secara historis, contoh dari bentuk oligarki penguasa kolektif bisa ditemui dari komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma, juga menurut Winters adalah praktek politik di Indonesia pasca-Soeharto.

Ketiga,bentuk oligarki terjadi ketika monopoli sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan oligark. Hubungan antara oligark bersifat patron-klien terhadap oligark yang berkuasa tersebut. Oligarki jenis ini disebut sebagai *Oligarki Sultanistik*. Wewenang dan kekerasan hanya dikuasai oleh penguasa utama, sedangkan para oligark lainnya menggantungkan pertahanan kekayaan dan hartanya pada oligark tunggal tersebut. Para penguasa oligark mengalahkan kapasitas oligark di bawahnya, biasanya dengan mekanisme alat kekerasan negara atau mencampurkan dengan sarana pemaksa individu. Para oligark bawahan yang tidak bersenjata kemudian mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumber daya yang dimilikinya kepada *oligark sultanistik*. Dengan itu, oligark penguasa berkewajiban melindungi oligark-oligark di bawahnya. Salah satu contoh mengenai oligarki sultanistik ini pada rezim Soeharto di Indonesia.

Keempat,oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark menyerahkan kekuasaannya pada lembaga nonpribadi dan terlembaga dimana hukum lebih kuat. Oligarki jenis ini disebut dengan *Oligarki Sipil*. Karena hak milik dan pertahanan harta telah disediakan oleh negara, maka fokus oligark hanya pada pertahanan pendapatan, yaitu upaya untuk mengelak dari jangkauan negara untuk meredistribusi kekayaan, misal melalui pajak progresif. *Oligarki sipil* tidak selalu bersifat demokratis dan melibatkan pemilu. Misalnya, Amerika dan India memang bersifat demokratis secara prosedural, tetapi di Singapura dan Malaysia bersifat otoriter. Dari beragam contoh itu, semuanya bersifat oligarki sipil.

Penelitian ini menggunakan tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil. Pilihan didasarkan pada konteks dinamika kekuasaan di Kota Batu yang menggambarkan suatu kondisi dimana terjadi persetubuhan dan koalisi kepentingan di antara penguasa lokal dengan para pengusaha yang memiliki basis sumber daya material yang berlimpah dalam mendikte kebijakan daerah. Para oligark ini kini tengah mengkapling-kapling wilayah kekuasaan bisnisnya di kota Batu. Mereka memanfaatkan lembaga publik yang ada dalam rangka memuluskan kepentingan bisnis dan kekuasaan.

Di sisi lain, oligarki di Kota Batu menyerupai oligarki sipil dikarenakan fakta yang terjadi di Kota Batu saat ini adalah para oligark di sana tidak menggunakan senjata (dalam arti senjata konvensional) untuk mempertahankan atau menghadapi berbagai ancaman terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Karena bertolak dari kenyataan dimana kesadaran terhadap hukum kian menguat di masyarakat, maka para oligark di Kota Batu pun demikian halnya, telah menyerahkan semua klaim atas hak miliki kepada negara melalui regulasi/hukum. Sehingga, fokusnya lebih dititikberatkan pada pertahanan pendapatan seperti menghindari pajak progresif.

Berbeda dengan Winters, menurut Hadiz & Robison (2013: 37), oligarki didefinisikan sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya. Oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan tempat hampir semua kekuasaan politik dipegang segelintir orang kaya yang menyusun dan membentuk kebijakan publik terutama demi keuntungan diri sendiri secara finansial melalui subsidi langsung untuk lahan pertanian atau perusahaan mereka, kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan, dan langkah-langkah proteksionis yang bertujuan merugikan para pesaing ekonomi mereka, sembari sedikit memperlihatkan atau sama sekali tidak memedulikan kepentingan rakyat banyak (Robison and Hadiz, 2004).

Oligarki-oligarki politik dan bisnis yang dulu dominan dipaksa untuk beroperasi dalam suatu arena dimana tarik-menarik politik dimediasi melalui partai-partai dan parlemen, dimana saluran kekuasaannya adalah para pialang dan Bandar politik, bukannya para jenderal dan aparatus negara. Kelangsungan hidup mereka pun kini tergantung kepada pembentukan aliansi-aliansi politik baru yang lebih luas (Robison and Hadiz, 2013: 148).

Sistem hubungan predatoris antara para pejabat, kalangan bisnis, dan pialang politik masih terus mewarnai perpolitikan Indonesia, mulai dari Jakarta hingga ke daerah-daerah dan kota-kota lokal. Dengan demikian, meruntuhkan struktur kekuasaan lama jelas merupakan sebuah upaya yang sulit. Dalam bidang ekonomi, konglomerat-konglomera lama tetap menjadi satu-satunya pemain di kota. Tidak ada aliran investasi asing yang masuk menggantikan konglomerat-konglomerat lama. Tidak ada borjuis domestik yang muncul untuk mendorong suatu revolusi neoliberal atau untuk merangkul sistem pasar yang ditata atas dasar transparansi dan akuntabilitas publik melalui berbagai peraturan (Robison and Hadiz, 2013: 118). Kepentingan-kepentingan oligarkis dapat secara instrumental memanfaatkan kekuasaan negara untuk melindungi diri mereka sendiri (Hadiz, 2005: 189).

Meskipun demikian, ‘cairnya’ politik dan masyarakat Indonesia setelah runtuhnya kekuasaan panjang Soeharto tidak nisacaya mengisyaratkan suatu keterputusan yang tajam dengan masa lalu dalam semua hal. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, masih tetap terdapat beberapa kontinuitas yang berasal dari peninggalan era kekuasaan Soeharto, terutama sifat-sifat dasar dari berbagai kepentingan dan kekuatan yang bersaing untuk membangun kembali kerangka politik. Sama sekali tidak tertutup kemungkinan apabila berbagai kontinuitas ini akan terus bertahan di masa depan (Hadiz, 2005: 216).

Lengsernya Soeharto tidak diikuti dengan konsolidasi kekuatan-kekuatan oposisi politik. Berbagai kekuatan yang ada tampaknya tidak siap mengisi kekosongan politik–terlepas dari lemahnya legitimasi politik yang melekat pada penggantinya, Habibie. Ketidaksiapan tersebut sebagian disebabkan oleh keberhasilan yang dilakukan melalui usaha yang keras dari Soeharto dalam mendisorganisasi kekuatan-kekuatan *civil society* (Hadiz, 2005: 222)*.* Ketidakmampuan membentuk suatu presidium, yang dapat menyatukan berbagai kekuatan kekuatan oposisi pada suatu masa genting dalam sejarah Indonesia, pada dasarnya mengisyaratkan tidak adanya kepaduan dalam gerakan oposisi (Hadiz, 2005: 223).

Sistem tersebut adalah sebuah sistem dimana parlemen dan partai-partai jauh lebih penting sebagai wadah persaingan sosial dan politik, dan dimana politik uang semakin tersebar luas. Di dalam sistem ini, kepentingan-kepentingan lokal–yang terdiri dari tokoh-tokoh daerah, para birokrat politik, dan para pengusaha–yang telah matang di bawah sistem patronase Orde Baru yang begitu luas, mungkin sekarang ini juga muncul sebagai suatu kekuatan yang lebih menonjol karena terkikisnya otoritas usat negara (Hadiz, 2005: 169). Dengan demikian, sistem yang menekankan pemilihan umum, partai-partai politik, dan parlemen, harus dipahami dari sudut pandang para pewaris dari rezim yang telah hancur, yang berjuang untuk menjamin kelangsungan mereka dalam perubahan lingkungan sosial dan politik yang terjadi menyusul kejatuhan Soeharto (Hadiz, 2005: 160).

Istilah predatoris (oligarki) adalah merujuk pada aparat negara dan otoritas publik yang menjadi milik dari suatu korps birokrat-politik yang tujuan utamanya adalah kekayaan politik dan ekonomi mereka sendiri. Kehidupan ekonomi dikendalikan dengan penggunaan kekuasaan ketimbang ditata dengan aturan-aturan, dan lebih memikirkan alokasi daripada regulasi. Kekuasaan arbitrer (sewenang-wenang) dan represif digunakan untuk mendisorganisasi *civil society* (Hadiz, 2013: 106)*.*

Dari definisi ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konsentrasi kekayaan yang ekstrim harus melekat dalam oligark. Kedua, oligark menggunakan instrumen politik untuk mengonsentrasikan kekayaan. Ketiga, adalah kekayaan pribadi yang menjadi tujuan dari pertahanan atau peningkatan kekayaan oligark.

**Memahami Struktur Oligarki di Kota Batu**

Dari hasil identifikasi berdasarkan skema oligarki Winters dan Robison-Hadiz, penelitian ini menemukan 2 nama yang masuk sebagai kategori oligark di Kota Batu. Keduanya adalah Eddy Rumpoko (mantan wali kota Batu) dan Paul Sastro (pengusaha). Berdasarkan *tracking* kekayaannya, ditemukan begitu banyak konsentrasi basis material yang mereka miliki. Eddy Rumpoko misalnya, semenjak menjabat kepala daerah pada tahun 2007-2012 mengalami peningkatan kekayaan sebesar 35%, dimana kekayaannya meningkat dari Rp 6.980.426.022 menjadi 9.416.895.815. Kekayaan tersebut terus meningkat secara drastis, yakni 99,6% pada tahun 2012 hingga 2017. Hanya dalam waktu 5 tahun menjabat sebagai kepala daerah kekayaannya meroket dari 9.416.895.815 berubah menjadi 16.438.612.628 *plus* USD: 181.437. Sehingga, total keseluruhan menjadi **Rp 18.797.293.628.** Jelas sebuah peningkatan yang cukup drastis.

Jelas data di atas nyaris kontras dengan realitas politik yang dilakoni DR. Yang membuat aneh bukan hanya peningkatan kekayaannya, melainkan kenapa ada kenaikan yang cukup drastis. Padahal, DR sebelum mencalonkan dirinya sebagai kandidat pilkada Batu 2017 pernah ikut bertarung di Pilbup kabupaten Malang 2016, meskipun kalah. Logikanya, kekayaan DR mestinya menurun mengingat besarnya *cost* politik yang dikeluarkan selama ikut Pilkada Kabupaten Malang. Sayangnya, yang terjadi justeru sebaliknya.

Oligark lainnya yang tak kalah berpengaruh adalah Paul Sastro (PS). Yang terakhir ini bisa dibilang oligark yang punya pengaruh besar dalam menyokong basis material ER dan DR. Bagaimana tidak, sejumlah unit usaha yang dimiliki mampu membawanya menjadi salah satu pebisnis terkaya di Jawa Timur dengan total kekayaan yang memukau. Sastro mula-mula merintis bisnisnya di bidang kepariwisataan di Kota Batu dengan mendirikan **Jatimpark 1** yang kemudian terus berkembang membangun **Museum Satwa** dilanjut dengan **BNS**. Kemudian, berselang tahun-tahun berikutnya dibangunlah **Batu Secret Zoo,** lalu **Eco Green Park** di tahun 2012. Pada tahun 2013 didirikan lagi **Museum Angkut**, kemudian tahun 2014 membangun **Museum Tubuh.** Pada 2015 Sastro kembali membangun **Pedator Fun Park.**

Semua taman wisata dipegang oleh seorang *Operational Manager.* Kantor pusat atau Holding dari kesemua park tersebut yakni **PT. Bunga Wangsa Sedjati** berada di area Jatim Park 1. Pembangunan bisnis Sastro tidak hanya berhenti di situ, 2 tahu terakhir ini, (2016, 2017), Sastro menambah satu lagi pusat hiburan yang cukup luas areanya, yakni **Dino Park** atau **Jatim Park 3.** Situs yang terakhir ini baru diresmikan pada 2018. Di antara ke 8 tempat wisata tersebut yang memiliki area paling luas yakni Jatimpark 2 (**Museum Satwa** dan **Batu Secret Zoo**) berdiri diatas lahan seluas 22 Hektare. Pengembangan terus dilakukan oleh masing-masing management, mulai dari menggabungkan transportasi ke antar park dengan membuat kereta monorail. Selain tujuan wisata Jatim Park Group juga memiliki hotel seperti *Hotel Pohon Inn, Pondok Jatimpark, Klub Bunga Butik Resort*.

**Tabel 2: Profil Oligark Kota Batu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Latar Belakang/Jabatan resmi** | **Harta/Aset Bisnis/Kekayaan** | **Sumber Daya Kekuasaan** | **Keterangan** |
| **Eddy Rumpoko** | * Walikota Batu selama dua periode (2007-2012; 2012-2017).
* Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang (2015-2016)
* Direktur Utama PT. Jenaka Agung
* Direktur Utama PT Duta Perkasa Unggul Lestari
* Direktur PT Tanjung Pura Resort 2004
* Komisaris PT Karunia Bumi Matahari 2003
* Manager Director PT Tlogomas Primatama 2006
* Komisaris Utama PT Ijen Sarana Media
* Ketua DPW Pemuda Pancasila (PP) Jatim (1990-1995)
* DPD REI Jatim (1996-2000)
* Ketua Pengda Ikatan Motor Indonesia Jatim (2002-2005)
* Ketua Generasi Muda FKPPI Jatim (1999-2000)
* Kabid Alam dan Lingkungan DPP Pemuda Pancasila (2002)
* Pengurus Kadin Jatim (2004)
* Ketua PSSI Kota Batu
* Wakil Ketua KONI Jatim
* Ketua Dewan Pembina Yayasan Arema Indonesia
 | Total kekayaan: 16.436.612.628 dan USD 181.437 dengan rincian:**Aset Tak Bergerak*** Kota Batu, berukuran 4.560 meter persegi bernilai Rp350 juta.
* Jakarta Selatan, seluas 90 meter persegi bernilai Rp1,2 miliar.
* Yogyakarta, luas 150 meter persegi
* Kota Malang (tak tertaksir)

**Aset Bergerak*** 2 unit mobil BMW keluaran tahun 1954 dan 2002,
* 1 unit Honda CR-V,
* 3 unit Toyota Alphard,
* 1 unit Mercedes Benz,
* 2 unit Toyota Innova,
* 2 unit Toyota Kijang,
* 1 unit Mazda Premacy,
* Hyundai Trajet,
* 1 unit Nissan X-Trail
* 1 unit motor Piagio LX, dengan total senilai Rp 3,895 Miliar.
* logam mulia dan barang-barang seni antik, surat-surat berharga, giro, piutang dan setara kas total senilai Rp 3,350 miliar.
 | * Kekuasaan nonmaterial (mobilisasi warga, hak politik formal, jabatan resmi)
* Kekuasaan material
 | Elit birokrasi |
| **Paul Sastro** |  | * **Jawa Timur Park Group** 2001
* **Jatim Park 1** (Pondok JatimPark) 2002
* **Jatim Park 2** (Museum Satwa 2008, Batu Secret Zoo 2009, Pohon Inn 2010)
* **Jatim Park 3** (Dino Park) 2016
* **Batu Night Spectaculer (BNS)** 2008
* **Eco Green Park** 2012
* **Museum Angkut** 2014
* **Museum Tubuh** 2014
* **Eco Green Park** 2012
* **Museum Angkut** 2014
* **Museum Tubuh** 2014
* **Predator Fun Park** 2014
* **Wisata Bahari Lamongan** (WBL/Tanjung Kodok Beach Resort 2004)
* **Maharani Zoo** 2008
* **Suroboyo Carnival Night** 2014
* **Citraraya World of Wonder** 2013
* **Klub Bunga Butik Resort** 1996
 | Kekuasaan material (kekayaan) | Elit ekonomi/ pengusaha |

*Sumber: Data diolah Peneliti 2018*

**Cara Kerja Oligarki dalam Penyusunan Kebijakan Publik di Kota Batu**

Kasus korupsi kebijakan yang tampak dari kasus PT BWR dan penyalahgunaan kewenangan untuk peringanan pajak merupakan dua contoh kasus yang mengonfirmasi dengan tegas bagaimana sistem relasi kuasa oligarki di Kota Batu bekerja. Kedua kasus membuktikan dengan gamblang bahwa Kota Batu yang dianggap atau dilihat dari luar tampak memesona ternyata tidak sebagus yang dikira banyak orang. Dengan kasus tersebut juga kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja oligarki dalam mengubah performa kebijakan di Kota Batu.

Seperti diketahui, oligarki adalah sebuah sistem relasi kuasa tempat dimana hampir semua sumber daya material terkonsentrasi pada oligark. Cara kerja oligarki selalu melibatkan penggunaan kapital atau sumber daya material untuk terus mempuku kekayaan dan atau melindungi kekayaan tersebut. Pengaruh penggunaan kapital ini jelas sangat istimewa. Dikatakan istimewa karena hampir sulit dalam sebuah arena kekuasaan yang dikuasai oleh para oligark, memberi celah pada aktor-aktor nonoligark untuk mengambil alih situasi.

Aktor-aktor nonoligark yang notabene tidak memliki basis material yang cukup dipaksa untuk tunduk atau bisa juga terserap oleh kekuasaan oligarki. Inilah masalah terbesarnya. Di Kota Batu hal ini tampak jelas. Pada saat pencalonan Dewanti Rumpoko kemarin banyak pihak terutama rival politik Dewanti merasa kewalahan untuk menandingi beliau dalam ajang kontestasi Pilkada lalu. Salah satu alasan di balik ketidakmampuan itu adalah lemahnya basis sumber daya kapital yang dimiliki.

Dengan didukung oleh pemodal sekelas Sastro, Dewanti jelas melenggang dengan mudah ke tampuk kepala daerah Kota Batu. Tak ada yang meragukan bahwa kekuatan finansial menjadi juru kunci dalam kontestasi politik dewasa ini. Ini disebabkan uang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Salah satu kelebihannya adalah ia mudah dikonversi dalam bentuk apapun dengan cepat dan efektif. Dengan begitu, mereka yang memiliki basis finasial kuat akan lebih mudah mendulang suara dalam kontestasi semacam Pilkada. Dan itu terkonfirmasi oleh kejadian pada Pilkada Batu 2017 lalu.

Di awal telah disinggung terkait pentingnya memahami elektoral politik sebagai jalan pintas para oligark membekuk institusi kekuasaan di aras lokal. Eddy Rumpoko sebelum menjadi orang nomor 1 di Kota Batu, mula-mula memanfaatkan sarana politik elektoral sebagai trajektori kekuasaannnya. Alhasil melalui itu pula dominasi (politik elektoral) kekuasaan ER kembali diawetkan dengan cara mendorong sang istri menggantikan posisinya yang sudah tak bisa lagi mencalonkan sebagai kepala daerah Kota Batu. Tampaknya batasan normatif itu tak menghalangi ER terus melanggengkan basis dominasinya di Kota Batu.

Penulis meyakini bahwa fenomena penilapan kebijakan di tangan oligark Kota Batu tidak hanya berhenti di dua kasus yang diulas dalam penelitian ini sebelumnya. Tepatnya, kedua kasus hanyalah merupakan perwakilan dari segudang persoalan yang berkaitan dengan penikungan kebijakan untuk kepntingan oligarki di Kota Batu. Kasus ER yang belakangan cukup menghebohkan publik sejagat Batu, karena tertangkap basah oleh KPK atas dugaan suap dengan salah satu pengusaha ternaman dari Jakarta.

Meski kasus tersebut tidak menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, ia tetap menjadi bukti kuat kalau pengaruh oligark dalam menyulap kebijakan publik di Kota Batu bukan isu yang diada-adakan. Hal yang harus dipahami lebih jauh terkait bekerjanya oligarki di Kota Batu adalah pegangan atas premis umum oligarki tentang penggunaan sumber daya material untuk kepentingan kekuasaan dan akumulasi kekayaan oligark. Ini penting mengingat oligark selalu mengerahkan sumber daya material ketika hendak mempertahankan kekayaannnya dari ancaman teretntu atau ketika hendak meningkatkan volume kekayaannya.

Ciri umum ini penting untuk dipahami sebagaimana yang kini berlangsung di Kota Batu melalui dua kasus yang telah dibahas. Hubungan tersebut dapat juga dideskripsikan dalam bentuk relasi bisnis-politik. Maksudnya, antara variabel ekonomi dan politik sulit dipisahkan dalam memahami watak oligarki. Sebagai contoh, dalam konteks korupsi kebijakan PT BWR, ER menggunakan jabatannnya (kekuasaan politik) untuk memulusukan niat jahatnya yakni menggelontorkan sejumlah dana yang bersumber dari APBD sebesar 1 miliar rupiah kepada investor Batu Tourism Center (Chaled) dengan tujuan pengerukan keuntungan (kepentingan ekonomi).

 Rumus sederhana inilah yang berlaku dalam sistem relasi kuasa oligarki. Meski pada konteks lebih luas kekuatan oligarki juga terus berusaha menjinakkan sejumlah kekuatan aliansi gerakan rakyat. Hal yang kedua ini sengaja dilakukan agar meredam gejolak sosial dari bawah yang dinilai mengancam kondusivitas agenda penghisapan dan perampasan sumber daya yang tersedia.

Pada kasus yang terakhir ini memang sengaja tidak dijadikan bahasan dalam karya ini, sebab keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyoalnya lebih dalam. Memang penting untuk mengungkap cara kerja oligarki dalam mendislokasi gerakan sosial oposisi. Hal itu bertujuan agar menyingkap lebih detail bagaimana kekuasaan oligarki bekerja. Akan tetapi, pembuktian adanya oligarki di Kota Batu dengan cara mengungkap ciri-ciri oligarki dan bagaimana bekerjanya oligarki dengan mengungkap kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk peringanan pajak dan korupsi PT BWR sudah cukup menerangkan apa yang menjadi tujuan dari pembuktian itu.

Kasus korupsi kebijakan PT BWR ini menunjukkan dengan jelas betapa kuatnya posisi ER dalam menyulap sejumlah agenda kebijakan di Kota Batu, terlepas hal itu bertentangan dengan aturan yang ada. Kasus ini masuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. Korbannya adalah Dwi Martono Arlianto. Beliau menjalankan instruksi wali kota ER saat itu karena menilai itu sebuah perintah dari atasan. Meski akhirnya dirinya harus dijebloskan ke dalam trali besi.

Berdasarkan keterangan saksi sebagaimana telah disajikan dalam pembahasan di awal, bahwa peminjaman uang kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Abdul Latief Chaled, S.H. (Direktur utama PT. Eka Citra Karya Mandiri) sebesar Rp 1 miliar adalah pemberian langsung dari ER. Sehingga beliau tidak menyangka akan beruurusan dengan saudara Arlianto yang saat itu bertindak sebagai pemberi dana itu. Jadi, logikanya ER memberikan uang entah dalam bentuk pemberian cuma-cuma atau berupa pinjaman kepada saudara Chaled namun melalui tangan Arlianto. Sialnya, dana tersebut bersumber dari APBD yang semula diperuntukkan bagi modal PT BWR.

Akibat tindakan tersebut Arlianto yang ketika itu menjabat sebagai Direktur PT BWR divonis bersalah dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan kewenangan. Padahal, dirinya melakukan itu atas erintah ER. Di sini ada persoalan yang jauh lebih rumit yang hanya dapat dipahami melalui kerangka pembacaan oligarki. Bahwa dalam lensa oligarki, tindakan tersebut merupakan tendensi motivasi oligark yang selalu ingin menjarah sumber daya yang tersedia. Oligark jarang mengindahkan hukum, sebab itu hanyalah sabuk administratif yang mengikat subjek di luar subjek oligarki. Bagi oligark hukum dibuat untuk menjinakkan yang lain bukan kepada mereka, sebab merekalah yang berkuasa dan berhak menentukan arah kebijakan dan aturan main yang ada. Singkatnya, mereka tak mungkin menghukum diri dengan cara membuat hukum.

Dalam konteks Kota Batu kebijakan daerah ditelikung oleh oligark (Sastro) melalui konsesi politik yang diperoleh dari ER. ER mengeluarkan aturan tentang penghapusan sanksi administrasi (pengampunan) terhadap para penunggap pajak, yang dalam hal ini paling besar dimiliki Sastro. Manfaat dari kebijakan tersebut jelas lebih banyak dinikmati oleh pemodal besar seperti Sastro yang punya banyak lapangan usaha di Kota Batu, ketimbang dirasakan oleh masyarakat kecil.

Menurut Robison and Hadiz (2013: 148) oligarki-oligarki politik dan bisnis yang dulu dominan dipaksa untuk beroperasi dalam suatu arena dimana tarik-menarik politik dimediasi melalui partai-partai dan parlemen, dimana saluran kekuasaannya adalah para pialang dan Bandar politik, bukannya para jenderal dan aparatus negara. Kelangsungan hidup mereka pun kini tergantung kepada pembentukan aliansi-aliansi politik baru yang lebih luas.

Alhasil, apa yang disinyalir oleh Robison-Hadiz kini terkonfirmasi di Kota Batu setelah menyaksikan hubungan simbiosis antara Paul Sastro dan Eddy Rumpoko. Pola relasi keduanya terhubung lewat hubungan saling melengkapi. Eddy Rumpoko adalah simbol kekuasaan di Kota Batu yang otomatis memiliki kontrol langsung terhadap segenap instrumen kekuasaan yang ada. Sementara, Sastro sebagai penguasa kapital di Batu berjasa besar dalam membesarkan nama ER.

Dari uraian di atas dapat juga dikatakan bahwa penelitian ini hendak mendukung atau memperkuat tesis oligarki sebagaimana yang digagas dan dikembangkan oleh Winters dan Robison-Hadiz. Hasil temuan lapangan membuktikan bahwa di Kota Batu terdapat sebuah bangunan kekuasaan oligarki yang melibatkan Eddy Rumpoko dan Paul Sastro sebagai oligark terkemuka di Kota Batu. Keduanya, meminjam istilah Winters (2011) mewakili tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil.

Indikasi adanya praktik oligarki penguasa kolektif di Kota Batu saat ini dapat disaksikan melalui pemanfaatan sekaligus pembajakan norma hukum yang berlaku demi kepentingan oligark. Kasus peringanan atau penghapusan piutang pajak oleh perusahaan milik Paul Sastro melalui kebijakan Eddy Rumpoko adalah fakta yang tak dapat dinafikan. Bahwa keduanya memiliki relasi bisnis-politik yang sangat istimewa. Saling menyokong kekuasaan dan memudahkan dalam urusan bisnis dan masalah piutang pajak.

Juga, dapat disebut terdapat indikasi adanya oligarki sipil di Kota Batu. Merujuk pada konsepsi oligarki sipil Winters (2011), yang mendeskripsikannya sebagai tipe oligarki yang tidak lagi menggunakan senjata untuk menaklukkan musuh-musuhnya atau berbagai ancaman karena penerapan hukum yang sudah mulai efektif. Kondisi dimana kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum mulai menguat ini membuat konsentrasi oligarki berubah fokus dari politik pertahanan kekayaan ke politik pertahanan pendapatan melalui penghindaran terhadap pematuhan pajak progresif. Juga, memperlihatkan sebuah konfigurasi dimana oligar tidak selalu mesti merebut kekuasaan, selama ia mampu mengontrolnya dari luar lewat persekutuan bisnis-politik.

Di Kota Batu juga menunjukkan adanya sebuah pola oligarki predatoris yang melibatkan klik penguasa pebisnis mengacak-acak tatanan politik demokratis yang menjanjikan kesejahteraaan sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal. Kenyataan ini sejalan dengan gagasan oligarki Robison and Hadiz yang menyebut oligarki sebagai manifestasi sistem relasi kuasa yang cenderung ditunggangi oleh kepentingan politisi dan pengusaha yang notabene memiliki kontrol penuh atas sumber otoritas publik dan kapital. Alhasil di Kota Batu realitas ini terlihat dari adanya representasi kedua figur politisi dan pemodal (ER dan PS) dalam menyulap desain pembangunan maupun sejumlah kebijakan di Kota Batu.

Pada sisi tertentu penelitian ini turut meneguhkan hasil studi oligarki yang dilakukan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan dalam BAB II. Bahwa dalam penelitian ini ditemukan sejumlah bukti terkait adanya relasi bisnis-politik yang melibatkan para aktor-aktor berpengaruh di daerah dengan basis kepemilikan sumber daya material yang mumpuni serta memiliki akses penuh terhadap kekuasaan politik di daerah. Bahwa di bawah rezim oligarki kekuasaan akan cenderung didominasi dan dimanipulasi oleh para oligark untuk kepentingan kelompok mereka.

 Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam konteks kajian oligarki di ranah lokal. *Pertama,* penelitian ini mencoba mengisi kekosongan riset oligarki dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah untuk meringankan atau menghapus piutang pajak yang notabene dimiliki oleh oligark lain. Alhasil, melalui penelitian ini ditemukan bukti baru adanya fakta empiris terkait pengaruh kekuasaan oligarki di ranah perpajakan khususnya dalam praktik kekuasaan di daerah. Temuan ini tentu saja memperkaya analisis seputar studi oligarki yang selama ini belum menyentuh dimensi yang lebih spesifik.

*Kedua,* perbedaan lain tentang studi oligarki dalam penelitian ini adalah fokus penelitian pada isu korupsi kebijakan di daerah. Penelitian terdahulu memang sedikit banyak mengulas tentang adanya praktik korupsi dalam hal relasi kuasa yang melibatkan penguasa dan pebisnis lokal. Akan tetapi, elaborasi dan studi kasusnya kurang mendalam. Hal itu membuat kajian oligarki dalam praktik korupsi kebijakan daerah kurang mendapat analisis yang memadai. Alhasil, melalui penelitian ini *gap* tersebut mampu diatasi melalui temuan dalam praktik penyalahgunaan kewenangan Eddy Rumpoko dalam memberikan peminjaman uang kepada Chaled melalui tangan Dwi Martono Arlianto.

Dengan adanya beberapa temuan baru dalam penelitian ini tentu saja turut meneguhkan relevansi dan urgensi kajian oligarki di Indonesia pascareformasi, terutama dalam praktik kekuasaan di daerah. Bukti temuan di atas tidak saja memperkuat teori-teori oligarki yang belakangan marak dikembangkan oleh para teoretisi terkemuka seperti Winters, Robison dan Hadiz, melainkan memberikan sinyalemen kuat bahwa praktik oligarki tidak hanya benar-benar ada tetapi juga berlangsung cukup masif dan meluas. Salah satu di antaranya kini dapat ditemukan di Kota Batu.

**Penutup**

Akhirnya apa yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialahh sebagai berikut:*pertama,* Kota Batu sebagai sebuah wilayah yang baru memekarkan diri pada 2001 dari daerah induknya (Kabupaten Malang), kini tengah berada dalam cengkeraman kekuasaan oligarkis. Hal itu dapat disaksikan melalui praktik demokrasi yang didominasi oleh kekuatan oligark. Berdasarkan hasil penelusuran dan identifikasi, penelitian ini menemukan bahwa oligark di Kota Batu saat ini adalah Eddy Rumpoko (mantan wali kota Batu 2 periode/2007-2011) dan Paul Sastro, seorang pengusaha sukses di Jawa Timur yang sebagian besar unit bisnisnya berlokasi di Kota Batu.

*Kedua,* keduanya disebut sebagai oligark dalam penelitian ini disebabkan hasil analisis yang diperoleh memenuhi kriteria oligark sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Jeffrey Winters maupun Richard Robison and Vedi Hadiz. Bahwa oligark dipahami sebagai subjek atau aktor baik secara personal maupun kelompok yang dalam hal ini cenderung menggunakan sumber daya material (baca: kapital/aset kekayaan lainnya) dalam mempertahankan dominasi pada arena baik politik maupun ekonomi. Dengan demikian ER dan Paul Sastro adalah representasi dari kriteria semacam itu (oligark) di Kota Batu saat ini. Relasi antara Sastro dan ER dalam menyulap berbagai agenda kebijakan Kota Batu adalah wujud dari bekerjanya sistem relasi oligarki.

*Ketiga,*struktur kekuasaan oligarki beroperasi dalam bentuk intervensi terhadap kebijakan yang kerap menabrak berbagai aturan yang ada. Ini dapat dilihat dari kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberian keringanan pajak dan kasus korupsi kebijakan PT BWR. Kedua contoh kasus menunjukkan dengan gamblang bagaimana rezim politik oligarki di Kota Batu bekerja.